

Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Nanik Sulastri¹⁾

1) Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Jambi, Indonesia;
e-mail : arale_aj@yahoo.com

Abstract

This research has proposed to 1) To analyse sluice/puddle area control through drainage system in Kuala Tungkal City Tanjung Jabung Barat Regency 2) To have participation and community behaviour in drainage maintenance in Kuala Tungkal City Tanjung Jabung Barat Regency 3) To formulate government policy in Tanjung Jabung Barat in effort to manage drainage system Kuala Tungkal City. Primer data collection in this research conducted by surveying at field, interview and quitioner distribution for institution and community to get research goal. The primer data needed to cover existing condition of drainage system and community participation in sustainable drainage system management. The existing drainage system condition data received from observation and measurement at location, and community partitipation got from interviewing and quitioner list distribution to local community at Kula Tungkal City. From this research result showed 1) Parit 1, parit 2 and parit 3 as primer canal in secunder canal disposal through the sea. With function in drying, flowing and controlling water from sluice/puddle location at tungkal III subdistrict, Tungkal IV city and Patunas subdistrict. 2) Maintenance handed over to local community, the big portion becoming in regency government full responsibility. Institutional in community level only for temporary, including in subdistrict and district. No available regulation related with existing drainage management. 3) Responsibility arrangement firmly and coordinated with drainage system coordinator and related agency with BAPEMDAL as planner, PU agency as exsecutor and PPKTB to maintain and manage. Clear coordination with road users to avoid interference with canal drainiation.

Keywords : drainase, Existing condition, secunder canal, prime canal and tertier canal.

PENDAHULUAN

Pembangunan Kota Kuala Tungkal dalam kaitannya dengan pengendalian genangan, disebabkan oleh beberapa hal yaitu kondisi fisik dasar antara kota Kuala Tungkal dan daerah hinterland memungkinkan adanya daerah krisis geologi dan hidrologi yang akan menimbulkan masalah ekologis antara lain banjir musiman, sedimentasi di sungai, dan tanah longsor, timbulnya daerah genangan di Kota Kuala Tungkal yang merupakan perkembangan dari fenomena-fenomena alam, kawasan yang tergenang oleh banjir atau genangan lokal sebagian besar meliputi daerah pusat kota, semakin berkurangnya lahan resapan air terutama pada kawasan kota Kuala Tungkal, dimana 'run off' yang mengalir ke sungai-sungai tersebut menjadi kian membesar. Semakin tingginya air pasang dan lambatnya air turun merupakan sumber bencana banjir di kota Kuala Tungkal. Sistem drainase yang buruk menjadi penyebab utama banjir di Kota Kuala Tungkal. Kota Kuala Tungkal sebagai pusat Kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan wilayah langganan banjir, sebagian besar disebabkan

karena saluran air tidak ada, saluran tersumbat sampah, dan akibat bangunan yang mengganggu saluran. Faktor sistem drainase yang buruk memberi kontribusi terbesar sebagai penyebab banjir. Sistem drainase yang buruk inilah yang menyebabkan banjir lokal di Kota Kuala Tungkal. Sistem drainase yang buruk menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga terjadi genangan setiap kali hujan deras dan pada saat terjadinya fenomena alam seperti pasang dan surut. Penelitian ini menggunakan metode dasar adalah Deskriptif Evaluatif, yaitu metode studi yang mengevaluasi kondisi obyektif / apa adanya pada suatu keadaan yang sedang menjadi obyek studi (Sugiyono, 2002). Obyek studi yang dimaksud adalah, sistem pengelolaan drainase di Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagian telah mengalami penurunan kapasitas dan atau peningkatan debit. Kondisi ini mengakibatkan terjadi genangan pada waktu hujan yang mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga diperlukan adanya solusi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala tertentu pada lokasi penelitian. Tujuannya adalah untuk membuat gambaran secara sistematis. pemeliharaan drainase di Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Serta merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pengelolaan drainase di Kota Kuala Tungkal. Lokasi yang sering tergenang dan memiliki drainase di Kota Kuala Tungkal meliputi wilayah Kecamatan Tungkal Ilir yang terdiri dari 10 Desa/kelurahan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 Kelurahan dengan jumlah populasi 5.901 rumah tangga, 3 Kelurahan

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (PERDA) Nomor 08 Tahun 2008 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mandaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka Kecamatan Tungkal Ilir yang sebelumnya memiliki luas 252,9 Km² dengan 4 Kelurahan dan 9 Desa pada Tahun 2007, berubah menjadi 4 Kelurahan dan 2 Desa dengan luas wilayah 100,31 Km² (BPS, 2014:1).

Pengendalian daerah genangan melalui sistem drainase di Kota Kuala Tungkal.

Jaringan drainase yang terdapat di kota Kuala Tungkal dapat digolongkan terhadap 3 (tiga) jenis saluran yaitu jaringan primer, sekunder dan tersier. Pelayanan sistem drainase di Kota Kuala Tungkal dibedakan atas drainase alamiah dan drainase buatan di sepanjang tepi jalan yang merupakan saluran sekunder dan tersier. Drainase yang ada mengikuti sistem yang memadai yaitu dengan menggunakan anak sungai/parit sebagai saluran primer dipergunakan sebagai tempat pembuangan akhir saluran perkotaan yang bermuara ke Sungai Pengabuan dan laut merupakan penampungan dari saluran sekunder dimana saluran sekunder merupakan penampungan dari saluran tersier.

Melihat Kondisi realita dilapangan bila ditinjau dari sisi hidrologinya maka pengaliran drainase Kota Kuala Tungkal dapat di klasifikasikan atas:

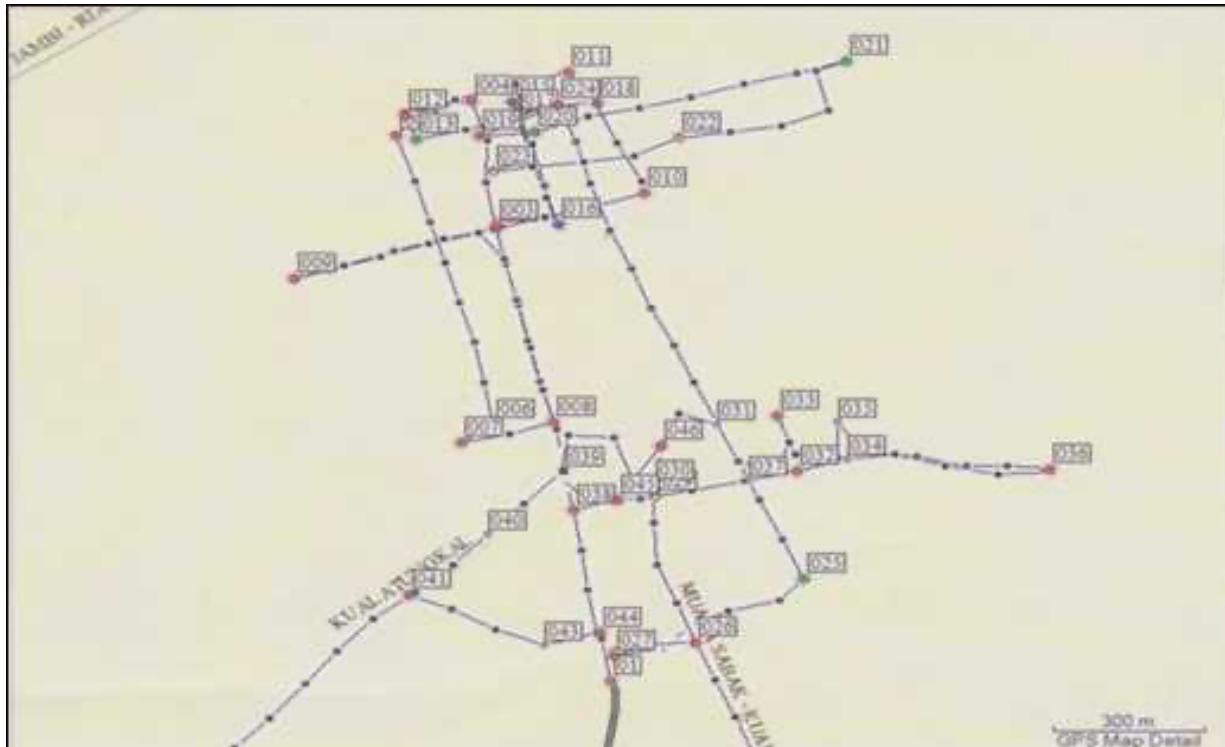
1. Drainase Primer adalah drainase utama yang berfungsi sebagai daerah tumpahan air dari drainase sekunder dan drainase tersier sebelum ke sungai/laut. Drainase Primer juga merupakan aliran-aliran sungai utama dan beberapa parit yang ada di Kota Kuala Tungkal. Drainase Primer yang ada di Kota Kuala Tungkal adalah Sungai Pengabuan, Sungai Betarungai Bram Itam dan beberapa parit yaitu Parit 1, Parit 2 serta parit 3.

2. Drainase Sekunder adalah wadah pengaliran dari drainase tersier sebelum ke drainase Primer.

© 2022 Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi

Citation: Nanik Sulastri. (2022). Analisis Pengelolaan Drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat . Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, 5(1); 62-66 doi : 10.22437/jpb.v5i1.18666

3. Drainase Tersier adalah drainase yang merupakan wadah pengaliran yang umumnya merupakan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang berada di lingkungan pemukiman rnaupun perkotaan.



Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam Rangka penataan drainase di Kota Kuala Tungkal.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Dengan fungsi kelembagaan yang masih lemah maka pelaksanaan kegiatan dengan target yang ingin dicapai belum berjalan efektif, perangkat peraturan terkait pengelolaan drainase belum tersedia, hal ini terkait dengan dukungan dana (APBD Kab/Provinsi ataupun APBN) yang masih sangat minim. Demikian juga dukungan dari dunia usaha belum berkembang sebagaimana diharapkan.

Dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di Daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah serta untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan di Daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah, dan terpadu, maka atas dasar pertimbangan di atas, Bappemdal Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Upaya Bappedal dalam pengelolaan drainase di Kabupaten Tanjung Jabung Barat drainase beberapa tahun terakhir menggambarkan kemajuan yang baik, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal ini dapat dilihat dari besaran dan realisasi anggaran yang dilaksanakan. Pada tahun anggaran 2013 dengan program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, melalui kegiatan penyempurnaan program percepatan sanitasi pemukiman (PPSP). Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 429.553.440.- dengan realisasi sebesar Rp. 139.500.500.- atau sebesar 32,48 %. Bertujuan untuk tersusunnya strategi sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat (SSK). Salah satu fokusnya adalah kondisi drainase Kota Kuala Tungkal. pada tahun 2014 terjadi peningkatan alokasi anggaran pada program dan kegiatan ini sebesar Rp. 966.272.000.- dengan realisasi sebesar Rp. 725.218.804.- atau sebesar 75,16%.

Dinas Pekerjaan Umum (PU). Pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan mempunyai peran untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mempertahankan daya dukung lingkungan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi daerah aliran sungai, pembangunan konstruksi ramah lingkungan dan peningkatan kualitas permukiman serta pembangunan berbasis kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur juga harus selaras dan bersinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dengan sektor-sektor lainnya, yang pada gilirannya akan menjadi modal penting dalam mewujudkan berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. Pembangunan infrastruktur harus diselenggarakan secara berkualitas supaya mampu menciptakan outcome yang berkelanjutan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (economic gains), menghadirkan keuntungan sosial (social benefits), meningkatkan layanan publik (public services), serta meningkatkan partisipasi politik (political participation) disegenap lapisan masyarakat hingga mampu mendukung pengembangan wilayah dalam rangka perwujudan dan pematapan daerah.

Penangan infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan wajib prioritas dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi bagian penopang utama peningkatan perekonomian dan kemandirian. Perhatian ini telah dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama serta terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran. Khusus pengelolaan drainase dengan nama program adalah program pembangunan saluran drainase melalui kegiatan pembangunan saluran drainase, penganggaran dilaksanakan hampir setiap tahun dari tahun 2012 besarnya anggaran Rp. 5,935,286,700.- dengan realisasi sebesar Rp. 1,919,005,800.- atau sebesar 32,33 %. Pada tahun 2013 besarnya anggaran Rp. 27,110,736,700.- dengan realisasi sebesar Rp. 21,094,410,820.- atau sebesar 77,81 %. Pada tahun 2014 besarnya anggaran Rp. 4,515,014,000.- dengan realisasi sebesar Rp. 4,368,283,000.- atau sebesar 69,75 %. Pada tahun 2015 besarnya anggaran Rp. 1,155,963,500.- dengan realisasi sebesar Rp. 72,263,500.- atau sebesar 6,25 %.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap analisis pengelolaan drainase Kota Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menjadikan parit 1, parit 2 dan parit 3 sebagai saluran primer untuk pembuangan saluran sekunder menuju ke laut. Dengan fungsi mengeringkan, mengalirkan dan mengendalikan air dari lokasi genangan di lingkungan kelurahan tungkal III, Tungkal IV Kota dan kelurahan Patunas.
2. Pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat setempat, namun porsi terbesar menjadi tanggung jawab penuh dari pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat melalui wadah Kelembagaan ditingkat masyarakat bersifat temporer dan untuk perangkat peraturan terkait pengelolaan drainase belum tersedia.

3. Penataan tanggung jawab yang tegas dan terkoordinir antara aparat pengelola drainase dan instansi terkait yaitu BAPEMDAL sebagai perencana, Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana/pembangunan dan PPKTB sebagai pemelihara dan pengelola. Koordinasi yang jelas dengan pengguna badan jalan sehingga tidak terjadi gangguan terhadap saluran drainase.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (1996), Pedoman Pengendalian Banjir, Volume III, Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Anonim. (1990), Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan SK SNI T-07-1990- F, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Anonim. (1986), Standard Perencanaan Irigasi, Kriteria Perencanaan Bagian Bangunan , Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Anonim. (1994), Tata Cara Perencanaan Drainase Permukaan Jalan SNI 03-3424- 1994, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.

Asdak, C. (1995), Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.